

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG

SEMESTER I TAHUN 2025

#sarasasadaya | rutankelas1bandung.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan maghfirah-Nya laporan Ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir jaman, Aamiin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester I Tahun 2025 ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan deskripsi capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya termasuk aspek keuangan. Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKJIP Semester I Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon saran untuk penyempurnaan penyusunan LKJIP tahun anggaran yang akan datang.

Kepala,
Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung



Pance Daniel

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Aspek Strategis.....	8
5. Isu Strategis.....	8
6. Sistematika Pelaporan.....	9
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
1. RENCANA STRATEGIS.....	10
2. PERJANJIAN KINERJA.....	16
BAB III.....	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
1. Capaian Kinerja.....	18
2. Realisasi Anggaran.....	21
3. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja.....	24
4. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	38
BAB IV.....	41
PENUTUP.....	41
1. KESIMPULAN.....	41
2. Saran.....	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2025 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dalam prosesnya.

Pada Semester I Tahun 2025, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki 4 sasaran kegiatan dan 23 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2025, dari 23 indikator kinerja kegiatan tersebut didapatkan rata-rata target capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan nilai capaian realisasi di sepanjang Semester I Tahun 2025 dapat memenuhi target secara keseluruhan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melakukan penyerapan anggaran pada Semester I Tahun 2025 ini mencapai sebesar 47,19% dari Pagu Rp. 28.900.196.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 13.636.600.866,- Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran dimana pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Rumah Tahanan Kelas I Bandung mendapatkan nilai akhir 99,47 dan nilai pada aplikasi SMART sebesar 92,54 (sangat Baik). Dengan demikian Nilai Kinerja Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 94,70. dimana nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Nilai IKPA (bobot penilaian 40%) dan Nilai SMART (bobot penilaian 60%).

Merujuk pada capaian kinerja kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Semester I Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester I Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan instansi vertikal di kota/kabupaten yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya bidang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2025 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain :

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Memberikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rutan Kelas I Bandung memiliki fungsi :

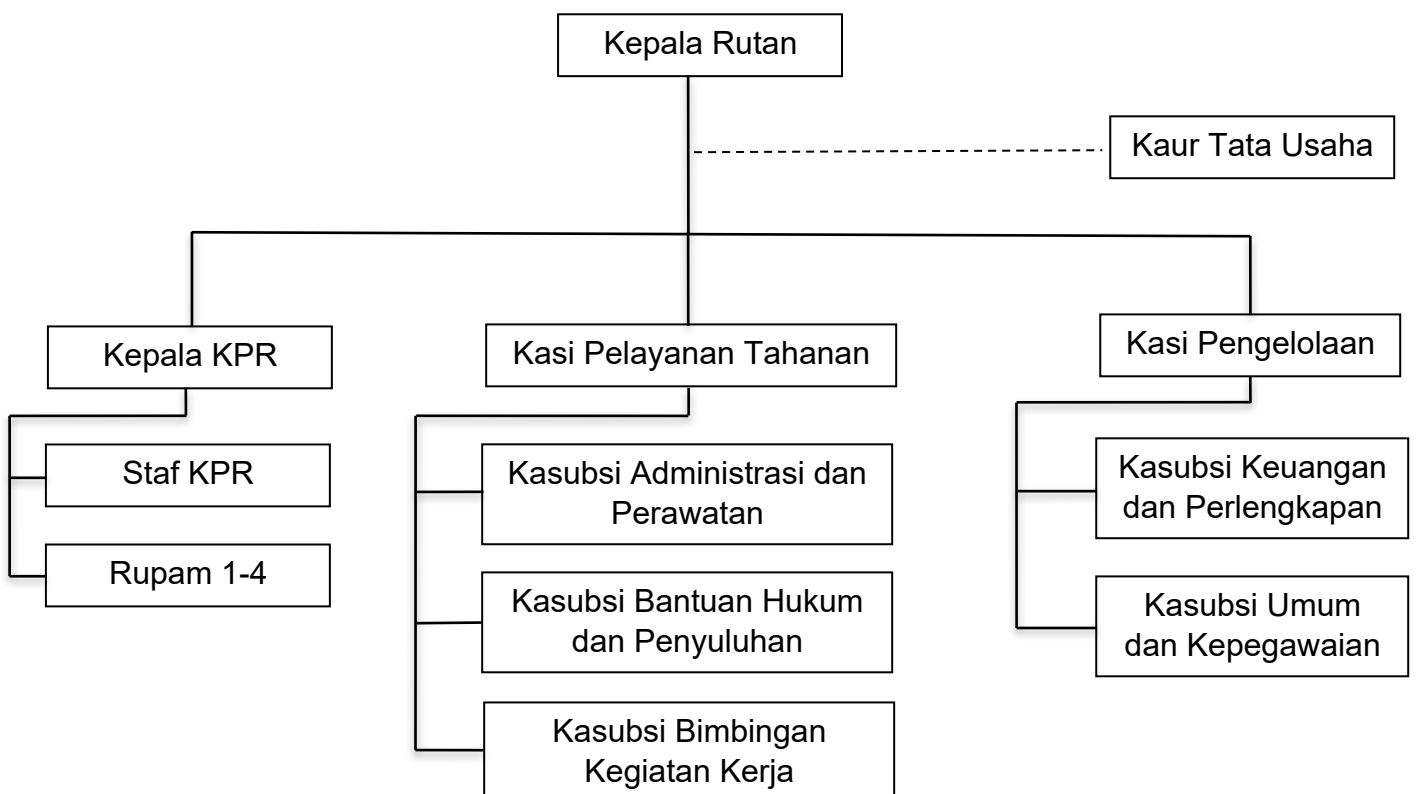
1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
3. Melakukan pengelolaan Rutan;
4. Melakukan tata usaha Rutan

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut, Rutan Kelas I Bandung memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan;
3. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Seksi Pengelolaan;
5. Kepala Urusan Tata Usaha;
6. Kepala Sub Seksi Umum;
7. Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan;
9. Kepala Sub Seksi dan Perawatan;
10. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja;

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap-tiap seksi dalam organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengelolaan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
2. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pelayanan tahanan yang berkaitan dengan administrasi dan perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum, serta bimbingan kegiatan kerja.
3. Kepala Kesatuan Pengamanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban dengan melakukan pengaturan jadwal penjagaan, penggunaan peralatan pengamanan dan pembagian petugas jaga agar terciptanya suasana aman dan tertib dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
4. Kepala Urusan Tata Usaha, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melaksanakan sistem administrasi persuratan dan pengarsipan dalam bidang ketatausahaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan segala kegiatan di Rumah Tahanan Negara.



Berikut adalah Profil Pejabat Struktural Rutan Kelas I Bandung Tahun 2025 :

1. Nama : PANCE DANIEL, A.Md.I.P., S.H., M.M.
NIP : 198501262005011001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
2. Nama : REZA ANTHA KUSUMA, A.Md.P., S.H.
NIP : 199305142016081001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : SANDY SUGILAR A.S, S.H.
NIP : 199004162009011001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
4. Nama : ARI DWI YULIANTO, S.Sos., M.H.
NIP : 198207242006041001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : BUDI SETIAWAN
NIP : 198403242009121007
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
6. Nama : MUHAMMAD ADI PUTRA, S.Tr.Pas
NIP : 199705302021011001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
7. Nama : THEO KRISTIAN SITOMPUL, A.Md.P.
NIP : 199112182016081001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
8. Nama : MUKHTAR, A.K.S
NIP : 196707121998031001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja
9. Nama : BUDI SANTIKA ASTRIADI, S.H.
NIP : 198003062005011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan
10. Nama : RIKI ADI RACHMAN, S.H.

NIP : 198103162009011004
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian

Rutan Kelas I Bandung didukung dengan jumlah SDM per 30 Juni 2025 sebanyak 161 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	139	86,33
2	Perempuan	22	13,66
TOTAL		161 Orang	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan			
		IV	III	II	I
1	S2	6	4	-	-
2	S1	-	50	-	-
3	D3	-	5	-	-
4	SMA	-	20	76	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-

3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyusun Laporan Kinerja TA 2025 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung;

3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung secara berkelanjutan.

4. Aspek Strategis

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Kota Bandung, Keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam menjalankan tugas fungsi Pemasyarakatan, Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung :

1. Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta bimbingan kegiatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

5. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isustrategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, dimana dengan jabatan Petugas/Anggota Jaga yang ditempatkan di subseksi lain selama bertahun-tahun namun belum bisa berpindah menjadi Jabatan yang sesuai pada subseksi tersebut;

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal

terkait sarana prasarana yang masih kurang memadai pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, seperti masih banyaknya pegawai yang menggunakan Alat Pengolah Data seperti Laptop non BMN alias kepemilikan pribadi karena kantor tidak memiliki jumlah prasarana yang cukup.

3. Anggaran

Dikarenakan Semester I Tahun 2025 masih dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19 maka terdapat beberapa kegiatan yang sempat tertunda ataupun diundur pelaksanaannya sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap kalender kerja yang berpengaruh kepada disbursement plant (rencana penarikan dana/RPD).

6. Sistematika Pelaporan

- **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Periode Semester I Tahun 2025.

- **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Periode Semester I Tahun 2025.

- **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

- **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2025.

- **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2025.

Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah:

Visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;

3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2025 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020 – 2025 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2025 :

LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2020 – 2025

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya			

Pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan, menyusun rencana strategis (renstra) digunakan sebagai rencana lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan indikator pengukurnya.

➤ Visi

Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

➤ Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

➤ Nilai dasar organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami "PASTI":

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

➤ Tujuan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; dan
2. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

➤ Sasaran

1. Perawatan dan Pembinaan

1. Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME;
2. Kualitas Intelektual;
3. Kualitas sikap dan perilaku;
4. Kualitas profesionalisme dan keterampilan; dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Pelaksanaan

1. Isi lebih rendah dari kapasitas;
2. Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib;
3. Meningkatkan secara bertahap jumlah Napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
4. Semakin menurunnya angka residivis;
5. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase yang ada di masyarakat;
6. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
7. Rutan dalam keadaan bersih dan terpelihara;
8. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.

➤ Peta strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang dalam sebuah gambar dan diagram ini dijadikan landasan arah kebijakan

yang Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

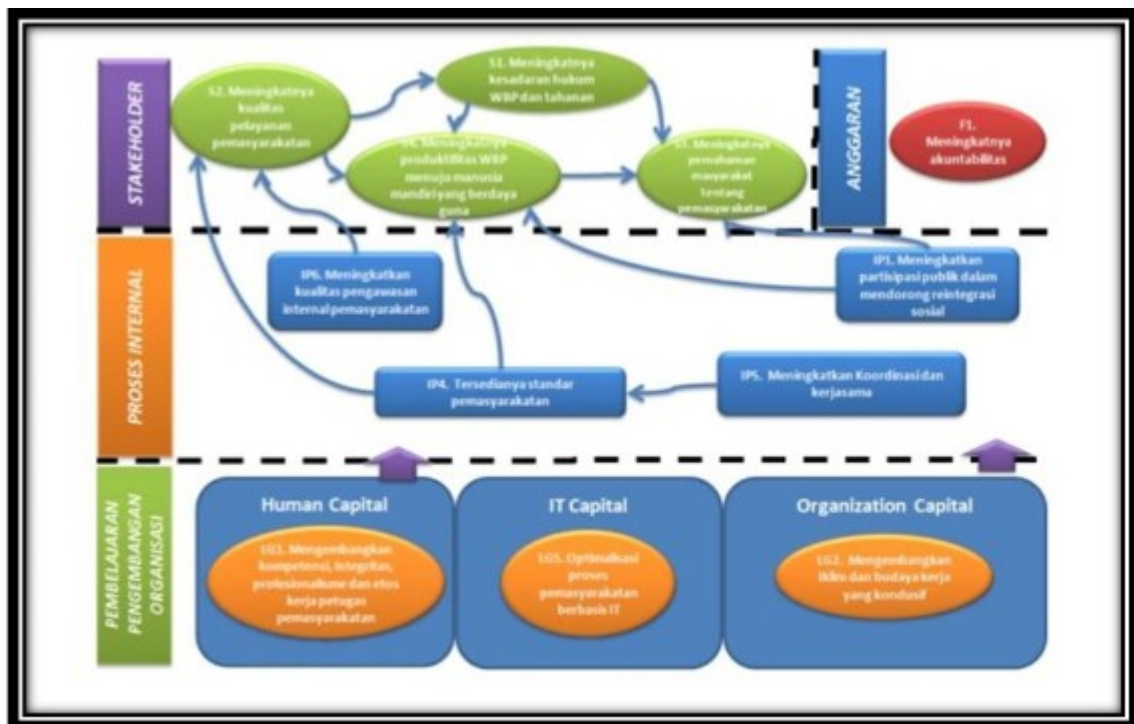


Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam diagram diatas menunjukkan bahwa menegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi nomor utama, yang kedua adalah pengelolaan Pemasyarakatan yang menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT, Ketiga meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk terlibat, mendukung dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan budaya kerja petugas yang bersih dan bermartabat,

➤ Arah Kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Rutan Kelas I Bandung sesuai dengan arah kebijakan dari Dirjen PAS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Setelah Rutan Kelas I Bandung mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara maka Rutan Kelas I Bandung sesuai arahan dari Dirjen Pemasyarakatan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan meningkatkan seluruh komponen penunjang dalam meraih predikat WBBM;
2. Penjamin standar pelayanan pemasyarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan;
3. Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
4. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, sop layanan, dan standar layanan;
5. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

➤ Perintah Harian

2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja Semester I Tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparman
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : R. Andika Dwi Prasetya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung
Suparman
NIP. 19750604 199602 1 001

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengidangan Penyakit Menular dan Pengidangan Kualitas Hidup Narapidana/Pasien Rehabilitasi Narkoba di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar 80% 2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan preventif secara berkualitas 94% 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 97% 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 80% 5. Persentase tahanan/narapidana lama yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 85% 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 85% 7. Persentase keberhasilan penangan penyakit menular HIV/AIDS (diukur jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 80%	80% 94% 97% 80% 85% 85% 80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying 90% 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 90% 3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 90%	90% 90% 90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 85% 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 80% 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 80% 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas 80%	85% 80% 80% 80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sakar	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 1 Layanan 2. Tersusunnya dokumen pengendalian BAK dan Kemrah tanggapan 1 Layanan 3. Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Temujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan Pemasarakatan	80
2.	Temujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	85 85 85 83
3.	Temujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
5. Jumlah Layanan Penanganan	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Pengawasan Hukum	Rp. 12.627.334.000,-
Pengembangan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 12.627.334.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 14.354.968.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 14.354.968.000,-

Bandung, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
R. Andika Dwi Prasetya
NIP. 196712171991031002

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung
Suparman
NIP. 19750604 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suparman
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, 2 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung
Suparman
NIP. 19750604 199602 1 001

Dokumen Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester I Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Semester I Tahun 2025, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan perincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/	80%	100%		100%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Narapidana/Anak sesuai dengan standar					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%		100%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%		100%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%		100%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%		100%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%		100%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%		100%	
	Persentase Tahanan	90%	100%		100%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
	yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum					
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%		100%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%		100%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%		100%	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan		100%	

2. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025

Kementerian Negara/Lembaga	: 137	Kementerian Imipas RI
Eselon I	: 04	Ditjen Pemasyarakatan
Wilayah/Provinsi	: 0200	BA(013) ES1(05) Jawa Barat
Satuan Kerja	: 692589	Rutan Kelas I Bandung
Jenis Satuan Kerja	: KD	Kantor Daerah



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

ENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ON I : 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
YAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
IAN KERJA : 520801 RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG
S SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/01/24 12:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_saliker
Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

DE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	2	3	4	5	6	7=5-6	8=3/4	9=4-7
1	BELANJA PEGAWAI							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,993,981,000	7,104,857,000	7,129,492,640	513,646	7,129,978,794	99.23	55,076,206
9	Belanja Gaji Pokok PNS	112,000	116,000	112,090	504	111,596	94.99	6,414
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	504,350,000	502,162,000	496,753,670	0	496,753,670	98.92	5,406,330
2	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	155,414,000	137,075,000	134,245,926	0	134,245,926	97.94	2,829,074
3	Belanja Tunj. Anak PNS	64,540,000	67,440,000	66,370,000	0	66,370,000	98.41	1,070,000
4	Belanja Tunj. Struktural PNS	609,504,000	575,610,000	572,805,000	0	572,805,000	99.51	2,805,000
5	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,310,000	10,010,000	9,414,470	0	9,414,470	94.05	595,530
6	Belanja Tunj. PPh PNS	445,093,000	425,862,000	424,815,720	0	424,815,720	99.75	1,066,280
9	Belanja Tunj. Beras PNS	1,751,616,000	1,621,616,000	1,601,362,000	0	1,601,362,000	95.75	20,254,000
1	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,520,000	4,670,000	4,210,000	0	4,210,000	90.15	460,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,529,440,000	10,529,440,000	10,439,581,516	514,350	10,439,067,166	99.15	90,372,834
	Belanja Lembur							
1	Belanja Uang Lembur	46,623,000	46,623,000	46,570,000	0	46,570,000	99.89	53,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	46,623,000	46,623,000	46,570,000	0	46,570,000	99.89	53,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	11,576,063,000	10,576,063,000	10,486,151,516	514,350	10,485,637,166	99.15	90,425,834
	BELANJA BARANG							
1	Belanja Barang Operasional	177,600,000	164,350,000	164,122,699	0	164,122,699	99.86	227,101
2	Belanja Keperluan Perkantoran	11,012,780,000	11,069,560,000	11,069,560,000	0	11,069,560,000	100	0
3	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	136,875,000	136,875,000	136,853,600	0	136,853,600	99.96	21,200
4	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000	100	0
5	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	153,840,000	153,840,000	153,840,000	0	153,840,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,405,895,000	11,529,425,000	11,529,176,699	0	11,529,176,699	100	248,301
	Belanja Barang Non Operasional							
1	Belanja Bahan	350,624,000	431,449,000	431,156,296	0	431,156,296	99.93	290,702
9	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	155,400,000	97,214,000	97,162,089	0	97,162,089	99.95	51,911
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	506,024,000	528,663,000	528,320,387	0	528,320,387	99.94	342,613
	Belanja Barang Persediaan							
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,051,110,000	1,241,800,000	1,241,117,626	0	1,241,117,626	99.94	762,372
1	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	205,620,000	107,895,000	107,457,201	0	107,457,201	99.76	237,799
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5216	1,336,730,000	1,349,695,000	1,348,574,829	0	1,348,574,829	99.93	1,000,171
	Belanja Jasa							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



ENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 ON I : 05 YAH/PROVINSI : 0200 IAN KERJA : 520801 S SATUAN KERJA : KD	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DITJEN PEMASYARAKATAN JAWA BARAT RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG
---	---

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 12:53 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

DE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
1	Belanja Langganan Listrik	1,104,000,000	1,071,100,000	1,061,791,154	0	1,061,791,154	99.13	9,300,846
2	Belanja Langganan Telepon	1,000,000	1,100,000	1,050,664	0	1,050,664	96.06	43,336
3	Belanja Langganan Air	72,000,000	74,470,000	64,107,600	0	64,107,600	86.09	10,362,400
1	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	1,656,000	1,500,000	0	1,500,000	90.58	156,000
1	Belanja Jasa Lainnya	3,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
2	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000	160,000	0	0	0	0	160,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,224,000,000	1,178,486,000	1,138,455,418	0	1,138,455,418	98.3	20,030,582
1	Belanja Pemeliharaan	550,216,000	550,216,000	550,204,508	0	550,204,508	100	13,492
2	Belanja Barang Persediaan Gedung dan Bangunan	72,000,000	87,000,000	86,950,000	0	86,950,000	99.94	50,000
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	132,347,000	162,197,000	162,035,313	0	162,035,313	99.9	161,687
3	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,000	1,295,000	1,270,000	0	1,270,000	98.07	25,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	805,660,000	830,710,000	830,459,821	0	830,459,821	99.97	250,179
1	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	9,000,000	5,250,000	4,090,000	0	4,090,000	93.14	360,000
3	Belanja Perjalanan Biasa	37,950,000	10,500,000	9,452,300	0	9,452,300	90.02	1,047,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	46,950,000	15,750,000	14,342,300	0	14,342,300	91.06	1,407,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	15,406,259,000	15,432,609,000	15,409,329,454	0	15,409,329,454	99.85	23,279,546
	JUMLAH BELANJA	26,962,322,000	26,008,672,000	25,895,480,970	514,350	25,894,966,620	99.56	113,705,380

3. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran kami sampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%		100%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%		100%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%		100%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%		100%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%		100%	

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari sasaran kegiatan tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

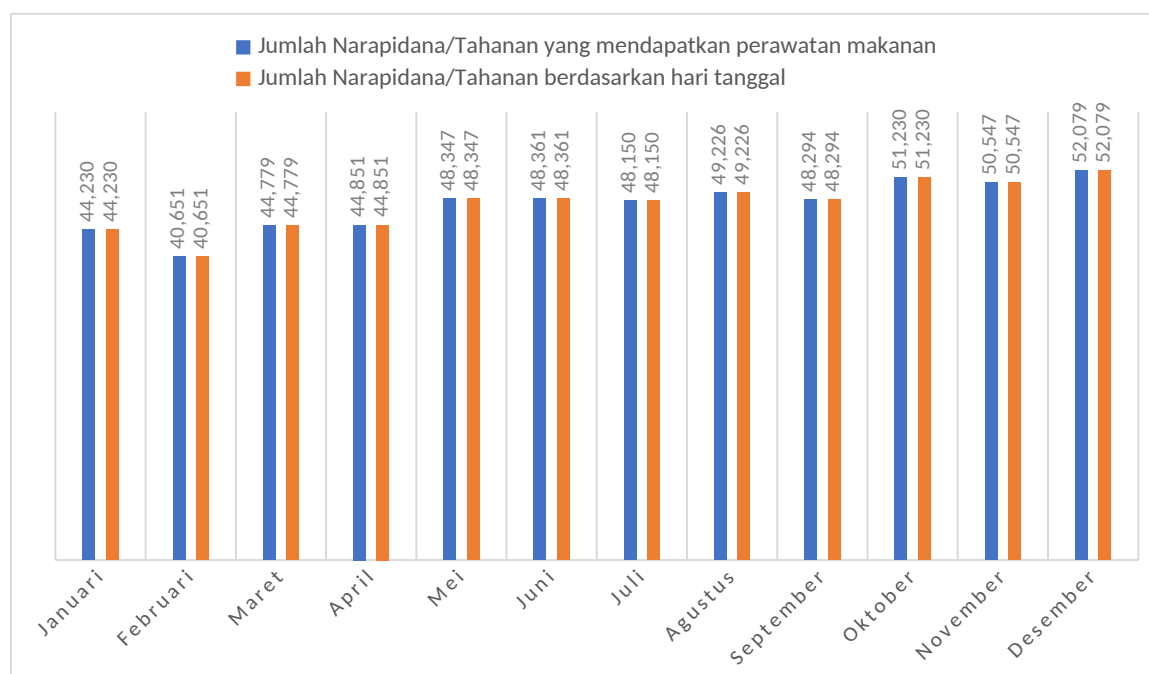
berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar;
2. Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi;
3. Persentase tahanan / narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis;

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar.



Berdasarkan data di atas, jumlah total narapidana dan tahanan selama Semester I Tahun 2025 berdasarkan hari tinggal adalah 570.745 orang dan jumlah narapidana dan tahanan yang mendapatkan makanan sebanyak 570.745 orang. Dengan data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan pemberian makan kepada tahanan / narapidana selama Semester I Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar sebesar 100%.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi.

Jenis Perlengkapan	Volume	Jumlah Pemenuhan	(%)	Keterangan
Pakaian narapidana/ tahanan	1.532 x 4 Stel	6.128	100 %	Volume barang sesuai dengan DIPA TA 2025
Perlengkapan Makan/Minum	1.532	1.532	100 %	
Perlengkapan Mandi	1.532	1.532	100 %	
TOTAL PEMENUHAN			100 %	

Berdasarkan data tersebut diatas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi selama Semester I Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi sebesar 100 %.

c. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis.

Jenis penyakit yang dialami WBP selama Semester I Tahun 2025

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
1	Abses	322	322
2	Anemia	49	49
3	Asthma Bronciale	72	72
4	Candidiasis	26	26
5	Caries Dentis	134	134
6	Cephalgia	96	96
7	Common Cold	162	162
8	Conjungtivitis	21	21
9	Cought	22	22
10	DKA	342	342

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
11	DM	26	26
12	Dysmenorhea	36	36
13	Dyspepsia	134	134
14	Gastritis	52	52
15	Gastro Enteritis	234	234
16	Ginggivitis	25	25
17	Haemorhoid	19	19
18	Hematemesis	6	6
19	Hepes Zooster	22	22
20	Hernia	3	3
21	Hordeolum	12	12
22	Hipertensi	463	463
23	Insect Bite	0	0
24	ISPA	356	356
25	ISK (infeksi saluran kemih)	12	12
26	Katarak OD	2	2
27	Konstipasi	63	63
28	Kolik Abdomen	9	9
29	Lypoma	4	4
30	Myalgia	23	23
31	Malaise	7	7
32	Neuropati	0	0
33	OA	24	24
34	OE	15	15
35	OMA	10	10
36	Obs Febris	143	143
37	Osteomyelitis	1	1
38	Pharyngitis	395	395
39	Post Trauma	9	9
40	Scabies	402	402
41	Stomatitis	25	25
42	Susp BPH	1	1
43	Susp HNP	5	5
44	Susp OA	12	12
45	Susp TB	21	21
46	TB Paru	17	17
47	Tinea	1	1
48	Thypoid	2	2
49	Tonsilitis	36	36
50	Tinitus	7	7
51	Urtikaria	32	32
52	Varicela	0	0
53	Vertigo	12	12
54	Vulnus Excoriasi	2	2
55	Vulnus Laceratum	2	2

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
TOTAL		3.928	3.928

Jenis perawatan WBP

Bulan	Rawat Inap Dalam Rutan	Rawat Inap Luar Rutan	Rawat Jalan
Januari	3	0	369
Februari	3	2	375
Maret	1	0	310
April	0	1	289
Mei	0	0	326
Juni	0	1	337
Juli	3	0	350
Agustus	2	2	256
September	0	0	362
Oktober	0	0	244
November	0	1	368
Desember	2	0	342
TOTAL	14	7	

Berdasarkan data tersebut di atas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan penanganan medis bagi tahanan / narapidana yang sakit selama Semester I Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian indikator persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis adalah sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

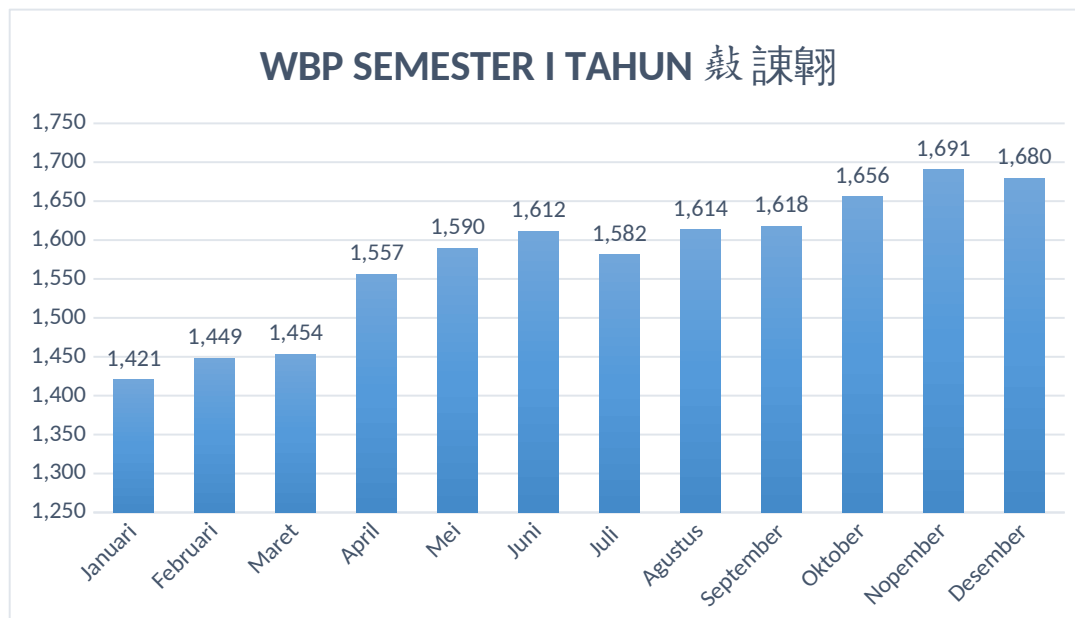
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%		100%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%		100%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%		100%	

Tabel 6. Indikator 1 Realisasi Kinerja Semester I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja, untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut kita harus menghitung presentase Kualitas Pelayanan Tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian indikator sebagai berikut:

- Persentase tahanan Overstaying;
- Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; dan
- Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang ada di Sistem database pemasyarakatan (SDP) jumlah WBP di Rutan Kelas I Bandung dapat digambarkan melalui grafik berikut :



- Capaian Indikator Kinerja: Persentase Tahanan Overstaying atau mengalami kelebihan masa tahanan selama Semester I Tahun 2025 sesuai dengan data yang diambil dari SDP adalah sebanyak 0 WBP atau dengan kata lain 100% tidak ada tahanan Overstay di Rutan Kelas I Bandung sepanjang Semester I Tahun 2025.

Adapun Indikator Persentase Tahanan Overstaying dapat diperkuat dengan data kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dimana pada Semester I Tahun 2025 Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	USULAN		DISETUJUI		JUMLAH
	PB	CB	PB	CB	
Januari	39	36	39	36	75
Februari	35	31	35	31	66
Maret	32	23	32	23	55
April	24	29	24	29	53
Mei	24	35	24	35	59
Juni	48	38	48	38	86
Juli	38	29	38	29	67
Agustus	23	21	23	21	44
September	22	33	22	33	55
Oktober	37	43	37	43	80
November	44	30	44	30	74
Desember	20	21	20	21	41
TOTAL	386	369	386	369	755

Selain data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan Mutasi Narapidana/Tahanan selama Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying sesuai standar, adapun data Mutasi Narapidana/Tahanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
Januari	LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA	1
Februari	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Maret	LAPAS KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG	5
April	LAPAS KELAS II B CIANJUR	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Mei	LAPAS KELAS I CIPINANG	1
Juni	NIHIL	
Juli	NIHIL	
Agustus	LAPAS KELAS I SUKAMISIN	15
	LAPAS KELAS II B BANJAR	25

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
September	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
	LAPAS KHUSUS KELAS II A KARANG ANYAR	2
Oktober	LAPAS KELAS II A SUBANG	35
November	LAPAS KELAS I NUSAKAMBANGAN	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	10
Desember	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	30
	LAPAS KELAS II A SUBANG	1
TOTAL		252

Melalui ketiga sumber data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying mendapatkan nilai sebesar 100%.

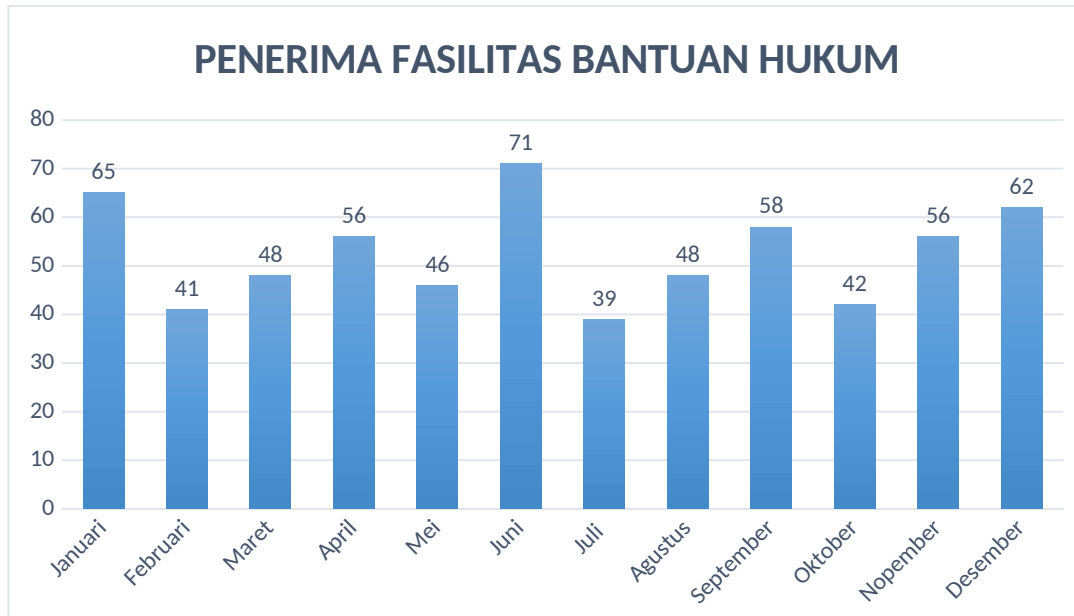
- b. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

BULAN	JUMLAH WBP	PESERTA PENYULUHAN	(%)
Januari	1.421	928	65,3
Februari	1.449	1.052	72,6
Maret	1.454	1.012	69,6
April	1.557	1.179	75,7
Mei	1.590	1.169	73,5
Juni	1.612	1.067	66,2
Juli	1.582	1.156	73,1
Agustus	1.614	1.188	73,6
September	1.618	1.120	69,2
Oktober	1.656	1.240	74,9
Nopember	1.691	1.216	71,9
Desember	1.680	1.100	65,5
TOTAL			70,9

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 70,2% dari total WBP yang ada di Rutan Kelas I Bandung, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase

tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

- c. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :



Grafik diatas menyampaikan bahwa seluruh bahwa Narapidana/Tahanan yang membutuhkan Fasilitas Bantuan Hukum telah mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%		100%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%		100%	
	Persentase pemulihan kondisi	80%	100%		100%	

	keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas			
--	--	--	--	--

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

1. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar;
2. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar.

Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai. Langkah- langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan tersebut adalah dengan memeriksa pegawai, tamu juga pengunjung yang masuk ke area portir beserta barang bawaan yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk menyaring barang – barang terlarang yang masuk ke dalam. Pada proses ini dilakukan oleh anggota Petugas Pengamanan Pintu Utama yang dibantu piket dari masing – masing seksi. Selain itu dilaksanakan pula penggeledahan terhadap kamar – kamar hunian WBP secara acak dan insidentil. Bagi petugas regu pengamanan dan piket, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban juga dapat dilakukan dengan cara kontrol di sekitar blok hunian.

Data Giat Razia dalam Rutan Semester I Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Januari	6	Instalasi Listrik	Dicatat dan Dimusnahkan
Februari	4	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Maret	3	- Handphone - Earphone - Charger - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
April	4	- Handphone - Headshet - Power bank - Garpu/ Sendok - Gunting - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Mei	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sikim - Kipas	Dicatat dan Dimusnahkan
Juni	6	- Handphone - Earphone - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Juli	3	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
Agustus	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
September	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Oktober	4	- Handphone - Earphone - charger - Kabel –kabel charger	Dicatat dan Dimusnahkan
November	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Desember	5	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama Semester I Tahun 2025, kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban selalu dilakukan sebanyak kegiatan dengan melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidental. Dengan demikian Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar selama Semester I Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar sebesar 100%

b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Pada Semester I Tahun 2025 telah dilaksanakan tindak lanjut gangguan keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Rutan Kelas I Bandung.

Data Pelanggaran Tata Tertib Semester I Tahun 2025

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang ditindaklanjuti
Pemberontakan	0	0
Penyelundupan/ Penggunaan Narkoba	3	3
Percobaan Pelarian	0	0
Penganiayaan / Kekerasan/ Perkelahian	6	6
Kepemilikan Handphone	19	19
Hutang Piutang	26	26
JUMLAH	59	59

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas I Bandung yang dilakukan oleh WBP selama Semester I Tahun 2025 sebanyak 59 (lima puluh sembilan), dan seluruh pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat berita acara dan sanksi kepada pelanggarnya. Dengan demikian gangguan keamanan yang terjadi selalu ditindak dan ditanggulangi sesuai standar. Hal ini menandakan Rutan Kelas I Bandung telah

melaksanakan penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan sesuai standar selama Semester I Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase gangguan keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pelayanan Tahanan di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER I TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit	1 Unit		100%	

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah layanan perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah

diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perkantoran sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Capaian Sub Indikator : Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

Dalam pelayanan pembayaran Gaji dan Tunjangan para pegawai Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada diagram berikut :

Data Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan hingga Juni 2025

No	Jenis Pembayaran	Jumlah	
1	Gaji Pokok PNS	Rp.	7.129.492.640
2	Pembulatan Gaji PNS	Rp.	112.090
3	Tunjangan Suami / Isteri	Rp.	496.753.670
4	Tunjangan Anak	Rp.	134.245.926
5	Tunjangan Struktural	Rp.	66.370.000
6	Tunjangan Fungsional	Rp.	572.805.000
7	Tunjangan Beras	Rp.	424.815.720
8	Uang Makan	Rp.	1.601.362.000
9	Tunjangan PPh	Rp.	9.414.470
10	Tunjangan Umum	Rp.	4.210.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hingga bulan Desember Semester I Tahun 2025 ada sembilan jenis pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai Rutan Kelas I Bandung, dan semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun, jadi persentasenya sebesar 100%. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

- b. Capaian Sub Indikator : Persentase operasional dan pemeliharaan kantor

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase Belanja operasional pemeliharaan kantor pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama Semester I Tahun 2025.

Dalam pelayanan operasional pemeliharaan kantor pada Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Kesehatan Pegawai	4.350.000	4.339.189	10.811
2	Pemeliharaan Gedung	667.218.000	667.154.508	63.492
3	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	94.642.000	94.464.432	177.568
4	Pemeliharaan Kendaraan	68.850.000	68.840.881	9.119
5	Langganan Daya dan Jasa	1.169.270.000	1.149.488.076	19.781.924
6	Jasa Pos	4.800.000	4.800.000	0
7	Keperluan perkantoran	213.750.000	213.376.176	373.824
8	Konsultasi dan Koordinasi	1.350.000	1.290.000	60.000
9	Jamuan Tamu	40.450.000	40.436.134	13.866
10	Honor Operasional Satuan Kerja	153.840.000	153.840.000	0
11	Penambah Daya Tahan Tubuh	136.875.000	136.853.800	21.200
12	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	3.100.000	3.000.000	100.000
TOTAL		0	0	0

Uraian kegiatan pada tabel di atas menerangkan bahwa selama 12 bulan, 12 (dua belas) kegiatan sudah terealisasi dengan baik atau 99% dari anggaran yang tersedia untuk operasional dan pemeliharaan kantor sudah terserap selama Semester I Tahun 2025. Dengan demikian sub indikator operasional dan pemeliharaan kantor telah dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada satuan kerja disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel dibawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran	
		Pagu (Rp)	Total realisasi (Rp)
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan	107.900.000	107.448.945
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	12.558.214.000	12.557.617.503
Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban	18.000.000	17.850.960
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Dukungan Manajemen Satker	190.000.000	188.528.850
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	13.134.558.000	13.024.034.712
Total		0	0

2. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan di satuan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terkait dengan kegiatan realisasi program perlu ditetapkan standar atau acuan untuk lebih kegiatan yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Pengukuran kinerja keuangan secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi:

- 1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan;
- 2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya biaya tersebut meningkat;
- 3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester I Tahun 2025. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama Semester I Tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada Semester I Tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2025 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2025. Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	100%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan	85%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	sesuai standar			
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Dari hasil capaian tersebut, maka Target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 82 % dengan realisasi sebesar 100 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester I Tahun 2025 telah memenuhi target. Capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berdasarkan hasil penghitungan di atas sudah termasuk kategori Baik

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester I Tahun 2025 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholder. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat, secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dan minimnya pemahaman petugas atas budaya pelayanan serta SOP mengenai pelayanan kunjungan yang kurang efektif dan efisien;
2. Tidak adanya pembinaan lanjutan bagi narapidana yang sudah bebas serta hasil pembinaan yang tidak maksimal;
3. Kurangnya tenaga medis pelaksana rehabilitasi serta tidak adanya anggaran untuk program rehabilitasi;
4. Minimnya anggaran sarana dan prasarana pembinaan keterampilan, minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan program pembinaan, serta minimnya minat narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian;
5. Tidak adanya tenaga infrastruktur tetap, sulitnya pemasaran untuk hasil karya narapidana, serta minimnya anggaran untuk pembinaan keterampilan kerja;
6. Pelayanan administrasi tergantung dengan internet, kurang pahamnya petugas tentang mekanisme dokumen laporan, dan keterlambatan administrasi dari penegah hukum lainnya;
7. Belum optimalnya SDP integrasi, terlambatnya litmas dari bapas, serta kurangnya kelengkapan administrasi pengusulan integrasi;
8. Minimnya ketaatan petugas untuk melaksanakan SOP serta sulitnya mengendalikan peredaran HP dan narkoba;
9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban serta tidak jeranya narapidana yang diambil tindakan atas pelanggaran; dan

10. Rendahnya budaya kerja, penguasaan teknologi, minimnya monitoring pelaksanaan tugas layanan internal perkantoran.

2. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I BANDUNG

SEMESTER II TAHUN 2025

#sarasasadaya | rutankelas1bandung.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan maghfirah-Nya laporan Ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir jaman, Aamiin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester II Tahun 2025 ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan deskripsi capaian kinerja yang diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya termasuk aspek keuangan. Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKJIP Semester II Tahun 2025 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon saran untuk penyempurnaan penyusunan LKJIP tahun anggaran yang akan datang.

Kepala,
Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung



viaSIUTU AIWI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	1
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
BAB II	10
PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS.....	10
B. PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III	19
AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja.....	19
B. Realisasi Anggaran.....	22
C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	25
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	40
BAB IV.....	42
PENUTUP	42
A. KESIMPULAN	42
B. Saran.....	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menjalankan tugas dan fungsi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PRIMA dalam prosesnya.

Pada Semester II Tahun 2025, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki 4 sasaran kegiatan dan 23 indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2025, dari 23 indikator kinerja kegiatan tersebut didapatkan rata-rata target capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan nilai capaian realisasi di sepanjang Semester II Tahun 2025 dapat memenuhi target secara keseluruhan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melakukan penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2025 ini mencapai sebesar 97,25% dari Pagu Rp. 31.334.589.000 dengan nilai realisasi sebesar Rp. 13.636.600.866,- Penilaian lain dari sisi kinerja anggaran dimana pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Rumah Tahanan Kelas I Bandung mendapatkan nilai akhir 99,33 dan nilai pada aplikasi SMART sebesar 98,39 (sangat Baik). Dengan demikian Nilai Kinerja Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 94,70. dimana nilai tersebut didapatkan dari perhitungan Nilai IKPA (bobot penilaian 40%) dan Nilai SMART (bobot penilaian 60%).

Merujuk pada capaian kinerja kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Semester II Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester II Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan instansi vertikal di kota/kabupaten yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia khususnya bidang Pemasarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain :

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
3. Memberikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan

Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah dan dipimpin oleh seorang Kepala Rutan. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung memiliki tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rutan Kelas I Bandung memiliki fungsi :

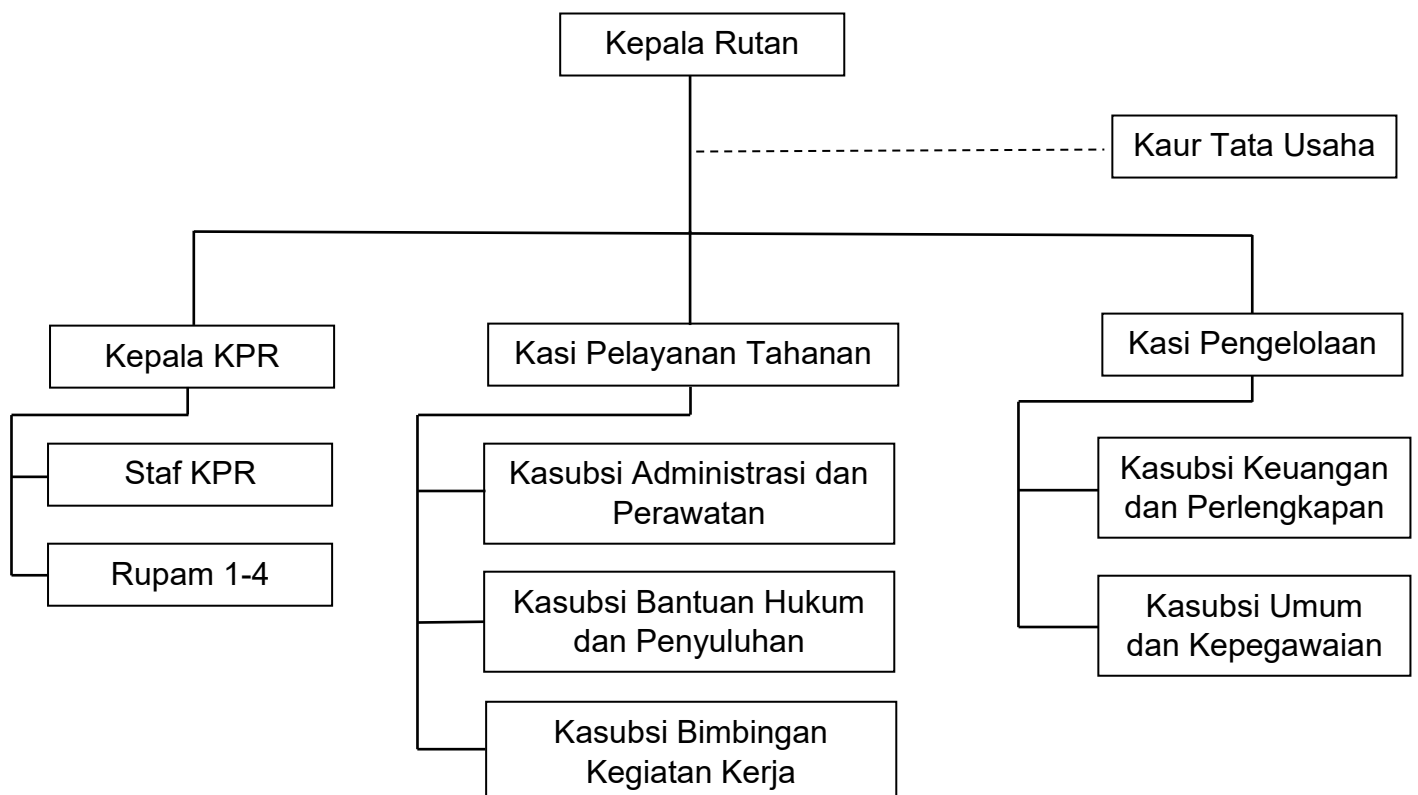
1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
3. Melakukan pengelolaan Rutan;
4. Melakukan tata usaha Rutan

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut, Rutan Kelas I Bandung memiliki Susunan Organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Rumah Tahanan Negara;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan;
3. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Seksi Pengelolaan;
5. Kepala Urusan Tata Usaha;
6. Kepala Sub Seksi Umum;
7. Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan;
8. Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan;
9. Kepala Sub Seksi dan Perawatan;
10. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja;

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari tiap-tiap seksi dalam organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengelolaan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
2. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pelayanan tahanan yang berkaitan dengan administrasi dan perawatan, bantuan dan penyuluhan hukum, serta bimbingan kegiatan kerja.
3. Kepala Kesatuan Pengamanan, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk Mengkoordinasikan tugas pengamanan dan ketertiban dengan melakukan pengaturan jadwal penjagaan, penggunaan peralatan pengamanan dan pembagian petugas jaga agar terciptanya suasana aman dan tertib dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara.
4. Kepala Urusan Tata Usaha, mengemban Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk melaksanakan sistem administrasi persuratan dan pengarsipan dalam bidang ketatausahaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan segala kegiatan di Rumah Tahanan Negara.



Berikut adalah Profil Pejabat Struktural Rutan Kelas I Bandung Tahun 2025 :

1. Nama : MASHURI ALWI, A.Md.I.P., S.H., M.H.
NIP : 198212142002121002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
2. Nama : I GUSTI BAGUS WIDYA PUTRA, A.Md.P., S.H., M.M.
NIP : 199108172016081001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : SOFIAN ARYEF, A.Md.P., S.M.
NIP : 198901052009121003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
4. Nama : MUHAMAD KAHFI, S.H., M.A.
NIP : 198106052007031002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : BUDI SETIAWAN
NIP : 198403242009121007
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
6. Nama : MUHAMMAD ADI PUTRA, S.Tr.Pas
NIP : 199705302021011001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
7. Nama : THEO KRISTIAN SITOMPUL, A.Md.P.
NIP : 199112182016081001
Pangkat/Gol : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
8. Nama : MUHAMMAD BAGINDA KUSUMA PUTRA KARTIWA, S.Tr.Pas
NIP : 199506012022011001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja
9. Nama : BUDI SANTIKA ASTRIADI, S.H.
NIP : 198003062005011001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan
10. Nama : RIKI ADI RACHMAN, S.H.
NIP : 198103162009011004
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian

Rutan Kelas I Bandung didukung dengan jumlah SDM per 31 Desember 2025 sebanyak 161 orang, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	139	86,33
2	Perempuan	22	13,66
TOTAL		161 Orang	

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan			
		IV	III	II	I
1	S2	6	4	-	-
2	S1	-	50	-	-
3	D3	-	5	-	-
4	SMA	-	20	76	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	-	-

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menyusun Laporan Kinerja TA 2025 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah instansi vertikal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkedudukan di Kota Bandung, Keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Barat dalam menjalankan tugas fungsi Pemasarakatan, Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung :

1. Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta bimbingan kegiatan bagi tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isustrategis yang menjadi hambatan dalam berkinerja adalah :

1. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, dimana dengan jabatan Petugas/Anggota Jaga yang ditempatkan di subseksi lain selama bertahun-tahun namun belum bisa berpindah menjadi Jabatan yang sesuai pada subseksi tersebut;

2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasaran yang masih kurang memadai pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, seperti masih banyaknya pegawai yang menggunakan

Alat Pengolah Data seperti Laptop non BMN alias kepemilikan pribadi karena kantor tidak memiliki jumlah prasarana yang cukup.

3. Anggaran

Dikarenakan Semester II Tahun 2025 masih dalam masa pemulihan pasca pandemi covid-19 maka terdapat beberapa kegiatan yang sempat tertunda ataupun diundur pelaksanaannya sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap kalender kerja yang berpengaruh kepada disbursement plant (rencana penarikan dana/RPD).

F. Sistematika Pelaporan

- **Kata Pengantar**

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Periode Semester II Tahun 2025.

- **Ringkasan Eksekutif**

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Periode Semester II Tahun 2025.

- **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan, dan sistematika laporan.

- **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Bab ini menguraikan rencana jangka menengah organisasi terkait visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja dan menyajikan terkait perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisi program/kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja.

- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menguraikan analisis pencapaian kinerja baik dari sisi Indikator Kinerja maupun Penyerapan Anggaran serta upaya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Semester II Tahun 2025.

- **BAB IV Penutup**

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta saran/rekomendasi untuk kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia bahwa “Fokus Pemerintah adalah Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju”. Peningkatan produktivitas SDM yang berorientasi pada hasil menjadi prioritas Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan nasional yang berlandaskan keunggulan kompetitif dengan didukung SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2025.

Sejalan dengan yang diarahkan dalam Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan presiden dan agenda pembangunan nasional maka ditetapkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

Sebagai instansi vertikal, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan R.I. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah:

Visi :

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur..

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan tata nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah :

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan Upaya peningkatan kualitas pelayanan;

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan;

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi social;

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI tahun 2025 – 2029 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di imigrasi dan pemasarakatan yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2025 – 2029 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia.

Berikut Landasan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Misi Presiden, dan Sasaran RPJMN 2020-2025 :

**LANDASAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN 2020 – 2025**

MISI PRESIDEN	SASARAN RPJMN	MISI KEMENKUMHAM	SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM
Nomor 6: Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya			

Pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan, menyusun rencana strategis (renstra) digunakan sebagai rencana lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan indicator pengukurnya.

➤ **Visi**

Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

➤ **Misi**

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

➤ Nilai dasar organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami “PASTI”:

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

➤ Tujuan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; dan
2. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

➤ Sasaran

1. Perawatan dan Pembinaan

- a. Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME;

- b. Kualitas Intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesionalisme dan keterampilan; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Pelaksanaan

- a. Isi lebih rendah dari kapasitas;
- b. Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib;
- c. Meningkatkan secara bertahap jumlah Napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya angka residivis;
- e. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase yang ada di masyarakat;
- f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- g. Rutan dalam keadaan bersih dan terpelihara;
- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.

➤ Peta strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang dalam sebuah gambar dan diagram ini dijadikan landasan arah kebijakan yang Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

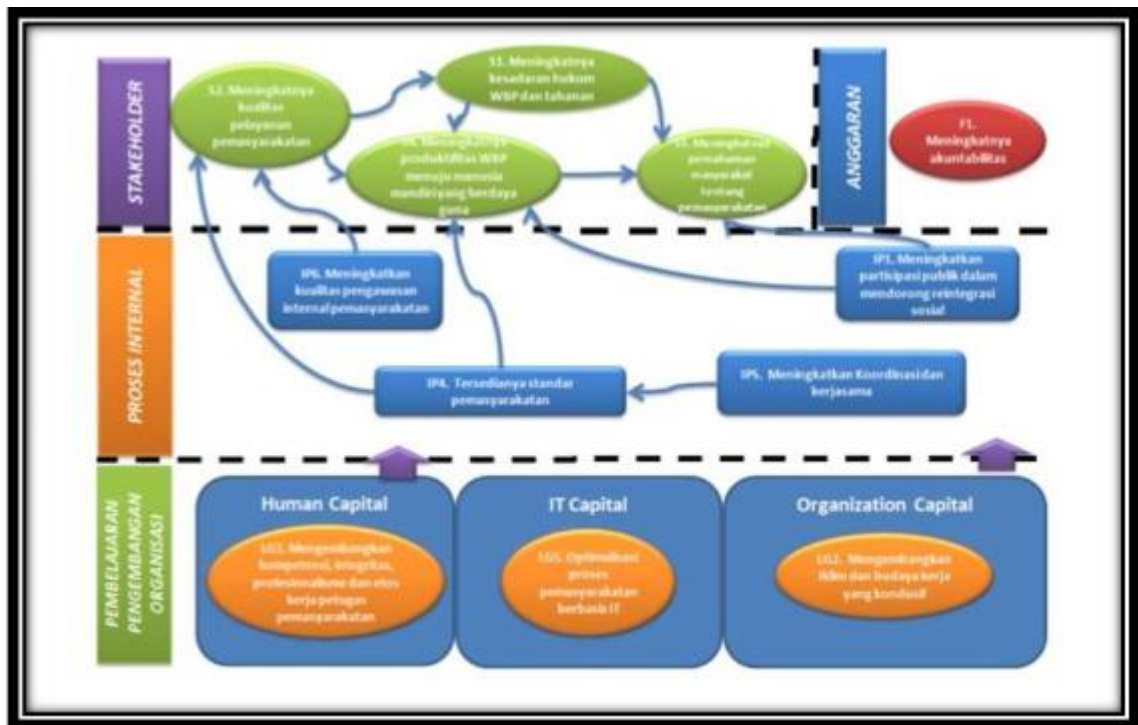


Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam diagram diatas menunjukan bahawa menegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatah menjadi nomor utama, yang kedia adalah pengelolaan Pemasyarakatan yang menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT, Ketiga meningkatkan Pastisipasi masyarakat untuk terlibat, mendukung dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan budaya kerja petugas yang bersih dan bermartabat,

➤ Arah Kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Rutan Kelas I Bandung sesuai dengan arah kebijakan dari Dirjen PAS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Setelah Rutan Kelas I Bandung mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara maka Rutan Kelas I Bandung sesuai arahan dari Dirjen Pemasyarakatan akan melanjutkan

- ke jenjang berikutnya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan meningkatkan seluruh komponen penunjang dalam meraih predikat WBBM;
- b. Penjamin standar pelayanan masyarakat dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan masyarakat;
 - c. Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
 - d. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, sop layanan, dan standar layanan;
 - e. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

➤ Perintah Harian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja Semester II Tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SURIYANTA LEONARDO SITUMORANG
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNALI
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat

Kusnali

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Suriyanta Leonardo Situmorang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA RUMAH Tahanan NEGARA KELAS I BANDUNG KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Iden di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar 85% 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 95% 3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 90% 4. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 90% 5. Persentase tahanan/narapidana/anak/ anak binaan yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 90% 6. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV/AIDS dan TB 90% 7. Persentase peserta rehabilitasi (pencandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba) yang kualitas hidupnya meningkat 8% 8. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/ PKA 25%	85% 95% 90% 90% 90% 90% 8% 25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase menurunya tahanan yang overstay 5% 2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian 90% 3. persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum 100%	5% 90% 100%
3.		1. Persentase pengadilan yang dibatalkan sesuai standar 90%	90%

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat ditegah 90% 3. Persentase kepatuhan dan disiplin tahanan/ narapidana/ anak/ Anak Binaan perilaku gangguan Keamanan dan Ketertiban 90% 4. Persentase Pemulihan Kondisi Kesehatan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara bulat 90%	90% 90% 90%
4. Meningkatkan Pelaksanaan kontrol/ Binares di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Performa Binares di lingkup UPT Pemasyarakatan 100% 2. Indeks reputasi unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan keasakapatan 3.1	100% 3.1

Kegiatan	Anggaran
Penyenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 14.562.805.000,-
Dukung Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 13.657.713.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat

Kusnali

Bandung, 21 Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung

Suriyanta Leonardo Situmorang

Dokumen Perjanjian Kinerja Semester II Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester II Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Semester II Tahun 2025, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan perincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/	80%	100%		100%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Narapidana/Anak sesuai dengan standar					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%		100%		100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%		100%		100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%		100%		100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		100%		100%
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%		100%		100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%		100%		100%
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%		100%		100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%		100%		100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%		100%	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%		100%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%		100%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%		100%	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan		100%	

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA PERIODE YANG BERAKHIR 31 desember 2025

Kementerian Negara/Lembaga	: 137	Kementerian Imipas RI
Eselon I	: 04	Ditjen Pemasyarakatan
Wilayah/Provinsi	: 0200	BA(013) ES1(05) Jawa Barat
Satuan Kerja	: 692589	Rutan Kelas I Bandung
Jenis Satuan Kerja	: KD	Kantor Daerah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 04
SATUAN KERJA : RUTAN KELAS I BANDUNG 692589

Tgl Data : 07/01/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 07/01/26 3:55 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_salker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,302,000	61,472,344	11,170,344	122.21	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	50,302,000	61,472,344	11,170,344	122.21	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	50,302,000	61,472,344	11,170,344	122.21	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	31,334,589,000	30,472,872,549	(861,716,451)	97.25	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	10,784,155,000	10,698,404,500	(85,750,500)	99.20	0	0	0	0
2. Belanja Barang	20,450,434,000	19,674,963,349	(775,470,651)	96.21	0	0	0	0
3. Belanja Modal	100,000,000	99,504,700	(495,300)	99.50	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 04
SATUAN KERJA : RUTAN KELAS I BANDUNG 692589

Tgl Data : 07/01/26 7:31 AM
Tgl Cetak : 07/01/26 3:55 PM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025			2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	5	7	8	9
			%			10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	31,334,589,000	30,472,872,549	(861,716,451)	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
Kota Bandung, 7 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

MASHURI ALWI
NIP. 198212142002121002

C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran kami sampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	80%	100%		100%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%		100%	
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%		100%	
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%		100%	
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%		100%	

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari sasaran kegiatan tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

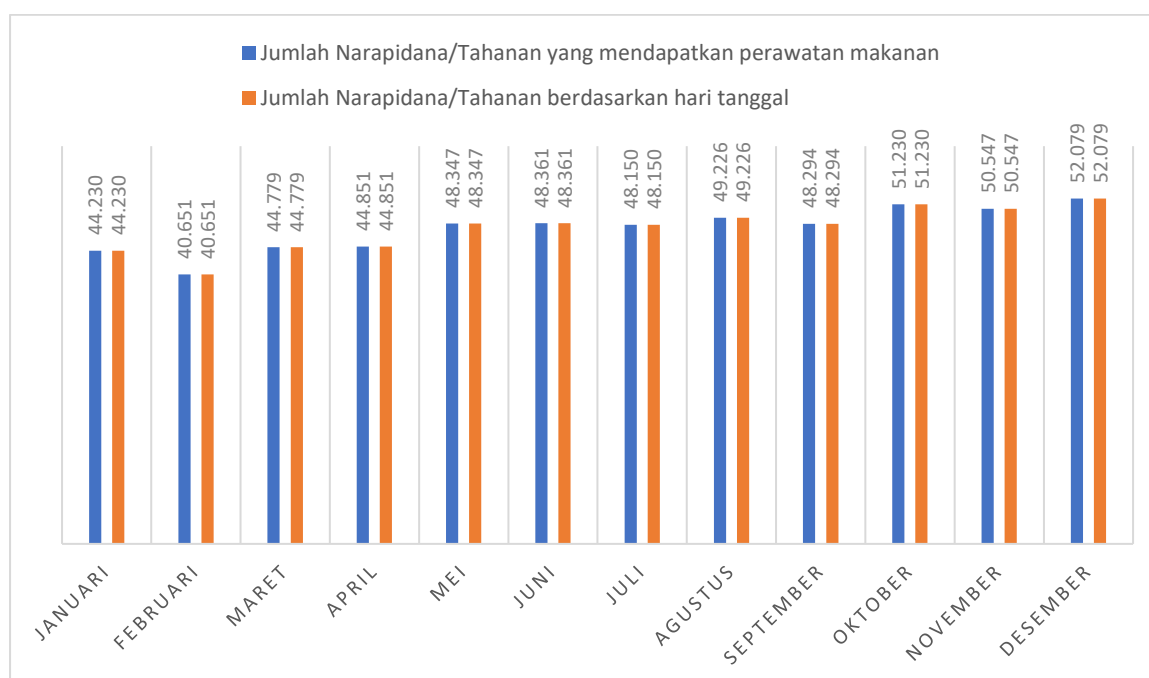
berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar;
- Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi;
- Persentase tahanan / narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis;

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar.



Berdasarkan data di atas, jumlah total narapidana dan tahanan selama Semester II Tahun 2025 berdasarkan hari tanggal adalah 570.745 orang dan jumlah narapidana dan tahanan yang mendapatkan makanan sebanyak 570.745 orang. Dengan data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan pemberian makan kepada tahanan / narapidana selama Semester II Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar sebesar 100%.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi.

Jenis Perlengkapan	Volume	Jumlah Pemenuhan	(%)	Keterangan
Pakaian narapidana/ tahanan	1.532 x 4 Stel	6.128	100 %	Volume barang sesuai dengan DIPA TA 2025
Perlengkapan Makan/Minum	1.532	1.532	100 %	
Perlengkapan Mandi	1.532	1.532	100 %	
TOTAL PEMENUHAN			100 %	

Berdasarkan data tersebut diatas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi selama Semester II Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi sebesar 100 %.

c. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis.

Jenis penyakit yang dialami WBP selama Semester II Tahun 2025

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
1	Abses	322	322
2	Anemia	49	49
3	Asthma Bronciale	72	72
4	Candidiasis	26	26
5	Caries Dentis	134	134
6	Cephalgia	96	96
7	Common Cold	162	162
8	Conjungtivitis	21	21
9	Cought	22	22
10	DKA	342	342

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
11	DM	26	26
12	Dysmenorhea	36	36
13	Dyspepsia	134	134
14	Gastritis	52	52
15	Gastro Enteritis	234	234
16	Ginggivitis	25	25
17	Haemorhoid	19	19
18	Hematemesis	6	6
19	Hepes Zooster	22	22
20	Hernia	3	3
21	Hordeolum	12	12
22	Hipertensi	463	463
23	Insect Bite	0	0
24	ISPA	356	356
25	ISK (infeksi saluran kemih)	12	12
26	Katarak OD	2	2
27	Konstipasi	63	63
28	Kolik Abdomen	9	9
29	Lypoma	4	4
30	Myalgia	23	23
31	Malaise	7	7
32	Neuropati	0	0
33	OA	24	24
34	OE	15	15
35	OMA	10	10
36	Obs Febris	143	143
37	Osteomyelitis	1	1
38	Pharyngitis	395	395
39	Post Trauma	9	9
40	Scabies	402	402
41	Stomatitis	25	25
42	Susp BPH	1	1
43	Susp HNP	5	5
44	Susp OA	12	12
45	Susp TB	21	21
46	TB Paru	17	17
47	Tinea	1	1
48	Thypoid	2	2
49	Tonsilitis	36	36
50	Tinitus	7	7
51	Urtikaria	32	32
52	Varicela	0	0
53	Vertigo	12	12
54	Vulnus Excoriasi	2	2

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
55	Vulnus Laceratum	2	2
T O T A L		3.928	3.928

Jenis perawatan WBP

Bulan	Rawat Inap Dalam Rutan	Rawat Inap Luar Rutan	Rawat Jalan
Januari	3	0	369
Februari	3	2	375
Maret	1	0	310
April	0	1	289
Mei	0	0	326
Juni	0	1	337
Juli	3	0	350
Agustus	2	2	256
September	0	0	362
Oktober	0	0	244
November	0	1	368
Desember	2	0	342
TOTAL	14	7	

Berdasarkan data tersebut di atas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan penanganan medis bagi tahanan / narapidana yang sakit selama Semester II Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian indikator persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis adalah sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%		100%	
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%		100%	

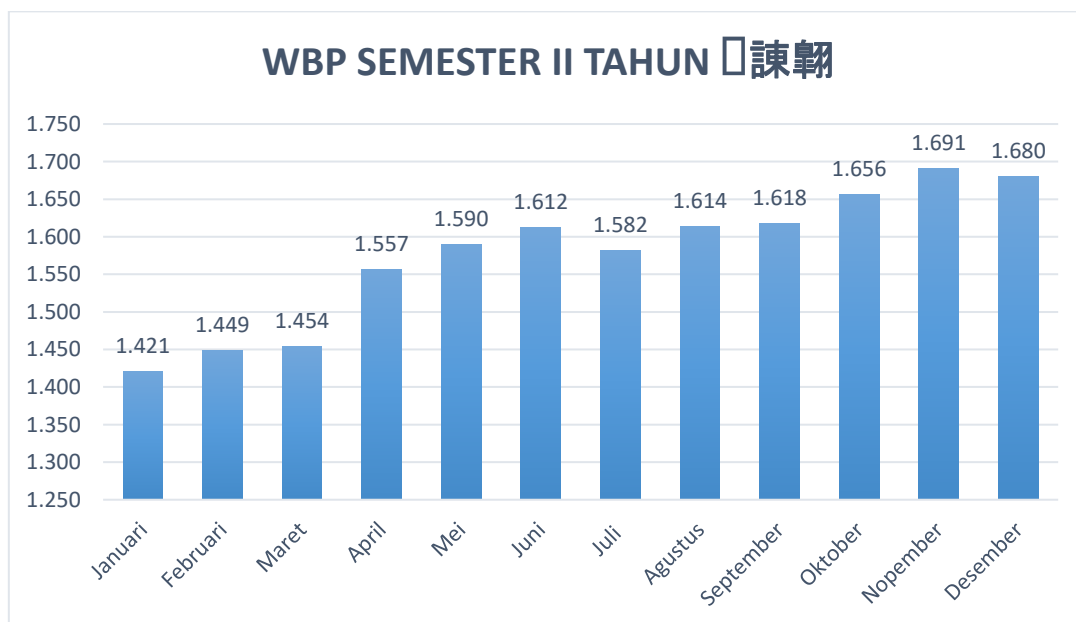
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	100%
--	--	-----	------	------

Tabel 6. Indikator 1 Realisasi Kinerja Semester II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja, untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut kita harus menghitung presentase Kualitas Pelayanan Tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian indikator sebagai berikut:

- Persentase tahanan Overstaying;
- Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; dan
- Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang ada di Sistem database pemasyarakatan (SDP) jumlah WBP di Rutan Kelas I Bandung dapat digambarkan melalui grafik berikut :



- Capaian Indikator Kinerja: Persentase Tahanan Overstaying atau mengalami kelebihan masa tahanan selama Semester II Tahun 2025 sesuai dengan data yang diambil dari SDP adalah sebanyak 0 WBP atau dengan kata lain 100% tidak ada tahanan Overstay di Rutan Kelas I Bandung sepanjang Semester II Tahun 2025.

Adapun Indikator Persentase Tahanan Overstaying dapat diperkuat dengan data kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dimana pada

Semester II Tahun 2025 Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	USULAN		DISETUJUI		JUMLAH
	PB	CB	PB	CB	
Januari	39	36	39	36	75
Februari	35	31	35	31	66
Maret	32	23	32	23	55
April	24	29	24	29	53
Mei	24	35	24	35	59
Juni	48	38	48	38	86
Juli	38	29	38	29	67
Agustus	23	21	23	21	44
September	22	33	22	33	55
Oktober	37	43	37	43	80
November	44	30	44	30	74
Desember	20	21	20	21	41
TOTAL	386	369	386	369	755

Selain data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan Mutasi Narapidana/Tahanan selama Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying sesuai standar, adapun data Mutasi Narapidana/Tahanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
Januari	LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA	1
Februari	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Maret	LAPAS KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG	5
April	LAPAS KELAS II B CIANJUR	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Mei	LAPAS KELAS I CIPINANG	1
Juni	NIHIL	

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
Juli	NIHIL	
Agustus	LAPAS KELAS I SUKAMISIN	15
	LAPAS KELAS II B BANJAR	25
	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
September	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
	LAPAS KHUSUS KELAS II A KARANG ANYAR	2
Oktober	LAPAS KELAS II A SUBANG	35
November	LAPAS KELAS I NUSAKAMBANGAN	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	10
Desember	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	30
	LAPAS KELAS II A SUBANG	1
TOTAL		252

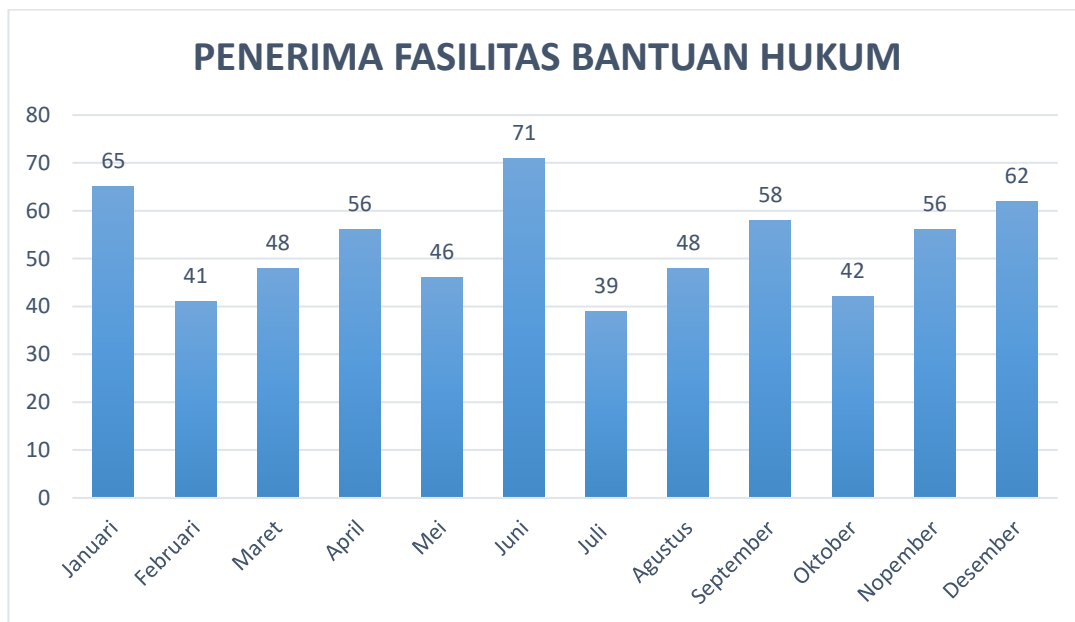
Melalui ketiga sumber data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying mendapatkan nilai sebesar 100%.

- b. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

BULAN	JUMLAH WBP	PESERTA PENYULUHAN	(%)
Januari	1.421	928	65,3
Februari	1.449	1.052	72,6
Maret	1.454	1.012	69,6
April	1.557	1.179	75,7
Mei	1.590	1.169	73,5
Juni	1.612	1.067	66,2
Juli	1.582	1.156	73,1
Agustus	1.614	1.188	73,6
September	1.618	1.120	69,2
Oktober	1.656	1.240	74,9
Nopember	1.691	1.216	71,9
Desember	1.680	1.100	65,5
TOTAL			70,9

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 70,2% dari total WBP yang ada di Rutan Kelas I Bandung, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

- c. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :



Grafik diatas menyampaikan bahwa seluruh bahwa Narapidana/Tahanan yang membutuhkan Fasilitas Bantuan Hukum telah mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 3

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keamanan dan Ketertiban

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%		100%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%		100%	

	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar;
- b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar.

Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai. Langkah- langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan tersebut adalah dengan memeriksa pegawai, tamu juga pengunjung yang masuk ke area portir beserta barang bawaan yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk menyaring barang – barang terlarang yang masuk ke dalam. Pada proses ini dilakukan oleh anggota Petugas Pengamanan Pintu Utama yang dibantu piket dari masing – masing seksi. Selain itu dilaksanakan pula pengeledahan terhadap kamar – kamar hunian WBP secara acak dan insidental. Bagi petugas regu pengamanan dan piket, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban juga dapat dilakukan dengan cara kontrol di sekitar blok hunian.

Data Giat Razia dalam Rutan Semester II Tahun 2025

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Januari	6	Instalasi Listrik	Dicatat dan Dimusnahkan

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Februari	4	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
Maret	3	- Handphone - Earphone - Charger - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
April	4	- Handphone - Headshet - Power bank - Garpu/ Sendok - Gunting - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Mei	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sikim - Kipas	Dicatat dan Dimusnahkan
Juni	6	- Handphone - Earphone - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Juli	3	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
Agustus	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
September	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Oktober	4	- Handphone - Earphone - charger - Kabel –kabel charger	Dicatat dan Dimusnahkan
November	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Desember	5	- Handphone - Headset - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama Semester II Tahun 2025, kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban selalu dilakukan sebanyak kegiatan dengan melaksanakan pengeledahan baik secara rutin maupun insidentil. Dengan demikian Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar selama Semester II Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar sebesar 100%

b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Pada Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan tindak lanjut gangguan keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Rutan Kelas I Bandung.

Data Pelanggaran Tata Tertib Semester II Tahun 2025

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang ditindaklanjuti
Pemberontakan	0	0
Penyelundupan/ Penggunaan Narkoba	3	3
Percobaan Pelarian	0	0
Penganiayaan / Kekerasan/ Perkelahian	6	6
Kepemilikan Handphone	19	19
Hutang Piutang	26	26
JUMLAH	59	59

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas I Bandung yang dilakukan oleh WBP selama Semester II Tahun 2025

sebanyak 59 (lima puluh sembilan), dan seluruh pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat berita acara dan sanksi kepada pelanggarnya. Dengan demikian gangguan keamanan yang terjadi selalu ditindak dan ditanggulangi sesuai standar. Hal ini menandakan Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan sesuai standar selama Semester II Tahun 2025 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase gangguan keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pelayanan Tahanan di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAHUN 2024		SEMESTER II TAHUN 2025	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan		100%	
	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Unit	1 Unit		100%	

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah layanan perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perkantoran sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Capaian Sub Indikator : Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

Dalam pelayanan pembayaran Gaji dan Tunjangan para pegawai Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada diagram berikut :

Data Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan hingga Desember 2025

No	Jenis Pembayaran	Jumlah	
1	Gaji Pokok PNS	Rp.	7.129.492.640
2	Pembulatan Gaji PNS	Rp.	112.090
3	Tunjangan Suami / Isteri	Rp.	496.753.670
4	Tunjangan Anak	Rp.	134.245.926
5	Tunjangan Struktural	Rp.	66.370.000
6	Tunjangan Fungsional	Rp.	572.805.000
7	Tunjangan Beras	Rp.	424.815.720
8	Uang Makan	Rp.	1.601.362.000
9	Tunjangan PPh	Rp.	9.414.470
10	Tunjangan Umum	Rp.	4.210.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hingga bulan Desember Semester II Tahun 2025 ada sembilan jenis pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai Rutan Kelas I Bandung, dan semua kegiatan tersebut berjalan dengan

baik sampai dengan akhir tahun, jadi persentasenya sebesar 100%. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase operasional dan pemeliharaan kantor

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase Belanja operasional pemeliharaan kantor pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama Semester II Tahun 2025.

Dalam pelayanan operasional pemeliharaan kantor pada Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Kesehatan Pegawai	4.350.000	4.339.189	10.811
2	Pemeliharaan Gedung	667.218.000	667.154.508	63.492
3	Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	94.642.000	94.464.432	177.568
4	Pemeliharaan Kendaraan	68.850.000	68.840.881	9.119
5	Langganan Daya dan Jasa	1.169.270.000	1.149.488.076	19.781.924
6	Jasa Pos	4.800.000	4.800.000	0
7	Keperluan perkantoran	213.750.000	213.376.176	373.824
8	Konsultasi dan Koordinasi	1.350.000	1.290.000	60.000
9	Jamuan Tamu	40.450.000	40.436.134	13.866
10	Honor Operasional Satuan Kerja	153.840.000	153.840.000	0
11	Penambah Daya Tahan Tubuh	136.875.000	136.853.800	21.200
12	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	3.100.000	3.000.000	100.000
TOTAL		2.558.495.000	2.537.883.196	20.611.804

Uraian kegiatan pada tabel di atas menerangkan bahwa selama 12 bulan, 12 (dua belas) kegiatan sudah terealisasi dengan baik atau 99% dari anggaran yang tersedia untuk operasional dan pemeliharaan kantor sudah terserap selama Semester II Tahun 2025. Dengan demikian sub indikator operasional dan pemeliharaan kantor telah dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada satuan kerja disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel dibawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran	
		Pagu (Rp)	Total realisasi (Rp)
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Layanan Tahanan	107.900.000	107.448.945
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	12.558.214.000	12.557.617.503
Operasi Bidang Keamanan	Layanan Keamanan dan Ketertiban	18.000.000	17.850.960
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Dukungan Manajemen Satker	190.000.000	188.528.850
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	13.134.558.000	13.024.034.712
Total		26.008.672.000	25.895.480.970

2. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan di satuan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terkait dengan kegiatan realisasi program perlu ditetapkan standar atau acuan untuk lebih kegiatan yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik

dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Pengukuran kinerja keuangan secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi:

- 1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan;
- 2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya biaya tersebut meningkat;
- 3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Semester II Tahun 2025. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama Semester II Tahun 2025 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada Semester II Tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI Tahun 2025-2029. Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	100%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan	80%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)			
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	100%
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	100%
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	100%
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	100%
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Dari hasil capaian tersebut, maka Target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebesar 82 % dengan realisasi sebesar 100 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester II Tahun 2025 telah memenuhi target. Capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung berdasarkan hasil penghitungan di atas sudah termasuk kategori Baik

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung Semester II Tahun 2025 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta

seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholder. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat, secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dan minimnya pemahaman petugas atas budaya pelayanan serta SOP mengenai pelayanan kunjungan yang kurang efektif dan efisien;
2. Tidak adanya pembinaan lanjutan bagi narapidana yang sudah bebas serta hasil pembinaan yang tidak maksimal;
3. Kurangnya tenaga medis pelaksana rehabilitasi serta tidak adanya anggaran untuk program rehabilitasi;
4. Minimnya anggaran sarana dan prasarana pembinaan keterampilan, minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan program pembinaan, serta minimnya minat narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian;
5. Tidak adanya tenaga infrastruktur tetap, sulitnya pemasaran untuk hasil karya narapidana, serta minimnya anggaran untuk pembinaan keterampilan kerja;
6. Pelayanan administrasi tergantung dengan internet, kurang pahamnya petugas tentang mekanisme dokumen laporan, dan keterlambatan administrasi dari penegak hukum lainnya;
7. Belum optimalnya SDP integrasi, terlambatnya litmas dari bapas, serta kurangnya kelengkapan administrasi pengusulan integrasi;
8. Minimnya ketaatan petugas untuk melaksanakan SOP serta sulitnya mengendalikan peredaran HP dan narkoba;
9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban serta tidak jeranya narapidana yang diambil tindakan atas pelanggaran; dan
10. Rendahnya budaya kerja, penguasaan teknologi, minimnya monitoring pelaksanaan tugas layanan internal perkantoran.

B. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

